



Nilai-Nilai Religi Dalam Efektivitas Realisasi Pendapatan Daerah Guna Mendukung Program Pembangunan Daerah

Efita Natasya Situmorang¹, Joy Fenika Manurung², Masjamilan Siregar³, Nasirwan⁴
Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4}

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: efitanatasya@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of local revenue realization, particularly Regional Original Revenue (PAD), in supporting regional development programs. PAD serves as a vital indicator of fiscal independence and a primary funding source for sustainable development efforts. However, many regions still face significant challenges in optimizing PAD potential. Gaps between revenue targets and actual realization, weak retribution management, low taxpayer compliance, and poor inter-agency data integration are major obstacles to effectiveness. This study utilizes a descriptive method rooted in qualitative analysis by examining existing literature and secondary data analysis from credible sources. The findings indicate that PAD effectiveness strongly influences a region's fiscal capacity to implement development functions, especially in public service and infrastructure sectors. Therefore, policy reform, strengthening of revenue collection systems, and improvement of human resource capacity are critical strategies to achieve fiscal autonomy and sustainable regional development. The integration of religious values into strategies for optimizing local revenue (PAD) can also enhance tax awareness through spiritual and social approaches, strengthen public trust in the government, and foster development that is not only materially oriented but also grounded in ethics and social justice.*

Keywords: *Local Revenue, Effectiveness, Regional Development*

Abstrak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas realisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam mendukung program-program pembangunan regional. PAD berfungsi sebagai indikator vital kemandirian fiskal dan sumber pendanaan utama bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Namun, banyak daerah masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan potensi PAD. Kesenjangan antara target pendapatan dan realisasi aktual, lemahnya manajemen retribusi, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta buruknya integrasi data antarlembaga merupakan hambatan utama terhadap efektivitasnya. Studi ini menggunakan metode deskriptif yang berakar pada analisis kualitatif dengan meninjau literatur yang ada dan analisis data sekunder dari sumber-sumber kredibel. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas PAD sangat memengaruhi kapasitas fiskal suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pembangunan, terutama di sektor pelayanan publik dan infrastruktur. Oleh karena itu, reformasi kebijakan, penguatan sistem pengumpulan pendapatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah strategi krusial untuk mencapai otonomi fiskal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai agama ke dalam strategi optimalisasi PAD juga dapat meningkatkan kesadaran pajak melalui pendekatan spiritual dan sosial, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi materi tetapi juga berlandaskan etika dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Pendapatan Daerah, Efektivitas, Pembangunan Daerah

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan manifestasi nyata dari desentralisasi fiskal yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek keuangan. Indikator utama kesuksesan desentralisasi terletak pada kapasitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan efisien. PAD tidak hanya menjadi simbol kemandirian fiskal, tetapi juga instrumen vital untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas realisasi PAD masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Banyak daerah dengan potensi ekonomi yang besar baik dari sektor jasa, perdagangan, properti, hingga pariwisata belum mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Potensi ini seharusnya dapat dimaksimalkan sebagai basis penerimaan, khususnya melalui pajak daerah dan retribusi. Sayangnya, dalam praktiknya, realisasi PAD di sejumlah daerah masih berada jauh dari target yang telah dirancang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi dan kinerja aktual pemungutan pendapatan daerah. Lebih lanjut, sektor retribusi daerah bahkan menunjukkan performa yang lebih memprihatinkan. Realisasi retribusi pada berbagai layanan publik seperti parkir, pasar tradisional, perizinan, dan pengelolaan aset milik daerah sering kali tidak mencapai target. Kegagalan dalam optimalisasi sektor ini menunjukkan lemahnya tata kelola pendapatan berbasis pelayanan publik.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas realisasi pendapatan daerah di antaranya adalah ketidakakuratan dalam pendataan objek pajak dan retribusi, minimnya integrasi data antar instansi teknis, lemahnya pengawasan terhadap wajib pajak, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya penyimpangan dalam penetapan dan penyetoran pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan BPHTB, yang berpotensi merugikan keuangan daerah secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya efektivitas fiskal yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Kondisi ini berdampak langsung pada implementasi program pembangunan. APBD sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah sangat tergantung pada sisi pendapatan. Ketika pendapatan tidak terealisasi sesuai target, maka program-program pembangunan yang telah disusun—baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

maupun ekonomi—akan mengalami pemangkasan atau penundaan. Hal ini tentu akan menurunkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Berbagai studi terdahulu juga menegaskan bahwa efektivitas realisasi pendapatan daerah memiliki korelasi langsung terhadap kualitas pembangunan. Misalnya, Tulisan Waroh et al. (2023) menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah yang stabil mampu menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Studi lain oleh Nasution dan Ningsih (2023) menggarisbawahi lemahnya sistem pelaporan dan sosialisasi pajak sebagai penyebab utama rendahnya realisasi PBB-P2, meskipun potensinya besar di berbagai daerah.

Melihat beragam isu yang telah diuraikan, diperlukan suatu penelusuran yang komprehensif guna menilai sejauh mana tingkat keberfungsian secara optimal realisasi pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Tulisan memanfaatkan metode kajian literatur sebagai dasar pendekatannya, disertai dengan mengkaji literatur dan data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti APBD, laporan BPK, serta artikel jurnal ilmiah terbaru dalam lima tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, menganalisis dampak fiskal terhadap pembangunan, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung tercapainya kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

2. METODE TULISAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai landasan utama. Studi pustaka dipilih karena Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi efektivitas realisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam mendukung program pembangunan melalui data dan literatur yang sudah ada. Sementara itu, jenis studi pustaka digunakan karena Tulisan ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung dari lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, teori, artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang telah tersedia sebelumnya.

Dalam konteks ilmu administrasi publik dan kebijakan fiskal daerah, studi pustaka memberikan keunggulan analitis karena dapat memadukan berbagai perspektif teoretis dengan data aktual. Tulisan studi pustaka ini bertujuan untuk membangun argumen dan analisis yang kuat dengan merujuk pada gagasan-gagasan konseptual yang telah dirumuskan oleh para pakar di bidangnya terdahulu serta berbagai hasil Tulisan yang telah dipublikasikan. Dengan mengkaji secara kritis literatur yang ada, peneliti dapat menelusuri perkembangan gagasan, mengidentifikasi kesenjangan dalam Tulisan sebelumnya, serta mengajukan sintesis atau

perspektif baru terhadap permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, fokus utama dari metode ini terletak pada telaah teoritis dan konseptual, bukan pada eksplorasi empiris di dunia nyata.

Sementara itu, asal informasi yang dimanfaatkan dalam tulisan ini diklasifikasikan sebagai data sekunder, yang meliputi literatur ilmiah yang diperoleh melalui berbagai literatur tertulis berbentuk karya cetak akademik, jurnal baik pada ranah domestik maupun global yang telah terakreditasi, prosiding konferensi, artikel ilmiah yang relevan, laporan Tulisan terdahulu, dan dokumen resmi yang terkait dengan topik yang dikaji. Peneliti melakukan seleksi secara ketat terhadap literatur yang digunakan, dengan memperhatikan tingkat kredibilitas, kemutakhiran, relevansi, dan otoritas penulis sumber.

Strategi pengolahan data dalam artikel ini mengandalkan pendekatan deskriptif, yang dilakukan melalui tahapan menghimpun informasi, mengorganisasikannya, dan menelaahnya secara sistematis guna memperoleh representasi yang rinci dan mudah dipahami terkait penyampaian data akuntansi keuangan daerah. Dalam tahap ini, peneliti tidak sekadar mengutip pernyataan dari sumber literatur, tetapi juga melakukan interpretasi dan sintesis untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, kecenderungan teoretis, serta perbedaan perspektif yang muncul. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang relevan sesuai dengan rumusan masalah. Dari hasil analisis tersebut, peneliti kemudian menyusun narasi ilmiah yang koheren dan mendalam, serta mengaitkannya dengan konteks kajian yang lebih luas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat daerah. PAD merupakan sumber pendanaan utama yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah sesuai Undang-Undang No. 33 Tahun 2004¹ (Lidya Even Jelista Dima, 2025). Penyerapan anggaran seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan besaran anggaran yang terserap, tetapi juga efektivitas penggunaannya dalam mencapai hasil yang diinginkan (Basem & Marina, 2024).

Realisasi PAD yang efektif dapat meningkatkan kapasitas keuangan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Misalnya, pada Tulisan yang

¹Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah.

dilakukan oleh Aida Muflikha Magfiroh, Kabupaten Lamongan menunjukkan tren peningkatan realisasi PAD dengan rata-rata pertumbuhan 35,42% selama periode 2013-2017, yang diikuti dengan peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan poros strategis desa, serta pelabuhan yang dikembangkan bersama pihak swasta dan pemerintah pusat (Magfiroh, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah mampu menyediakan dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur penting daerah.

Selain itu, data dari Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperlihatkan tren rasio efektivitas PAD yang meningkat dari 95,95% pada 2017 menjadi 112,57% pada 2020, dan diproyeksikan terus naik hingga 156% pada 2025 (Wahyudi Rusdi, 2021). Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kinerja pengelolaan PAD yang sangat efektif, sehingga memberikan dampak positif terhadap kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pelayanan public.

Pengelolaan PAD yang efektif tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Misalnya, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari pendapatan daerah diarahkan minimal 25% untuk belanja infrastruktur terkait percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi (Nurhayati, 2019). Walaupun terdapat beberapa tahun dengan efektivitas kurang optimal, secara umum pengelolaan dana tersebut sudah efektif dalam mendukung pelayanan public.

Di sisi lain, efektivitas pajak daerah di Kabupaten Kupang menunjukkan rasio efektivitas rata-rata 82,75% yang masuk kategori cukup efektif, sementara retribusi daerah masih rendah efektivitasnya (34,20%), yang berdampak pada kontribusi PAD terhadap pembangunan daerah (Lidya Even Jelista Dima, 2025). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengelolaan retribusi daerah agar dapat lebih mendukung pelayanan publik secara optimal.

Optimalisasi PAD dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, regulasi yang stabil, dan kebijakan pemerintah daerah dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi. Di Kabupaten Lamongan, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan tempat wisata sebagai sumber PAD, serta menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan PAD melalui pengawasan dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh (Magfiroh, 2019).

Faktor Penghambat Realisasi Pendapatan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah daerah menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kewenangan dalam menetapkan kebijakan fiskal dan memungut pajak, karena sebagian besar sumber pendapatan potensial, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya, masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan daerah sulit mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal. Studi di Jawa Barat menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan ini menjadi faktor penghambat signifikan yang menyebabkan rendahnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah (Kustiawan, 2006). Ketimpangan penguasaan sumber penerimaan ini mengakibatkan ketergantungan daerah pada dana transfer pusat dan menghambat kemandirian fiskal daerah (MIKO, 2004).

Pendapatan daerah sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Rendahnya kesadaran ini, yang dipengaruhi oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi, serta iklim perpajakan yang belum kondusif, menghambat optimalisasi PAD. Kesadaran wajib pajak yang rendah menyebabkan banyak potensi pajak dan retribusi tidak terealisasi, sehingga penerimaan daerah tidak optimal (Kustiawan, 2006). Selain itu, minimnya ketegasan dalam penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak juga memperparah masalah ini (Wijanarsa, 2019).

Biaya pemungutan yang tinggi secara langsung mengurangi pendapatan riil PAD. Inefisiensi dalam proses pemungutan, seperti administrasi yang rumit dan kurangnya teknologi pendukung, menyebabkan pemborosan sumber daya dan menurunkan hasil pungutan. Tulisan di Jawa Barat mengungkapkan bahwa collection cost merupakan komponen penghambat dominan yang berkontribusi negatif terhadap penerimaan PAD hingga 21,53% (Kustiawan, 2006). Hal ini menandakan perlunya efisiensi dalam sistem pemungutan agar dana yang diperoleh dapat lebih besar untuk pembangunan.

Kualitas dan kuantitas personil yang kurang memadai dalam pengelolaan pajak dan retribusi menjadi hambatan yang signifikan. Terbatasnya jumlah petugas lapangan dan kurangnya pelatihan menyebabkan proses pemungutan tidak optimal. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti sistem IT, perangkat lunak perpajakan, dan fasilitas administrasi yang belum memadai juga menghambat pelaksanaan pungutan secara efektif (Sitti Amalia, 2021). Kondisi ini mengakibatkan target penerimaan retribusi daerah sering tidak tercapai (Alexsander Reynaldi Koli, 2023).

Peraturan daerah yang mengatur tarif pajak dan retribusi seringkali tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi terkini, sehingga menghambat potensi penerimaan. Selain itu, regulasi yang kurang mengikat dan lemahnya penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh menyebabkan rendahnya efektivitas pemungutan PAD (Iflaha Takaria, 2017). Studi di

Kabupaten Muna menunjukkan bahwa tarif retribusi yang tidak disesuaikan dengan inflasi dan perkembangan ekonomi menyebabkan penerimaan retribusi sektor perikanan tidak optimal (Sitti Amalia, 2021).

Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD masih sangat kecil, hanya sekitar 2,68% kontribusinya terhadap peningkatan PAD, yang menunjukkan bahwa upaya dan orientasi pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola pendapatan daerah (Kustiawan, 2006). Faktor ini disebabkan oleh kurangnya inovasi, perencanaan yang belum berbasis potensi teoritis, dan belum efektifnya koordinasi antar unit kerja di daerah (Iflaha Takaria, 2017).

Karena PAD belum mampu menutup seluruh belanja rutin dan pembangunan, pemerintah daerah masih sangat mengandalkan alokasi keuangan yang dialirkan oleh otoritas pusat. Ketergantungan tersebut mengurangi kemandirian fiskal daerah dan menghambat pembangunan berkelanjutan yang berbasis sumber daya local (Kustiawan, 2006). Hal ini juga menimbulkan risiko ketidakstabilan keuangan daerah apabila dana transfer pusat mengalami penurunan.

Strategi Optimalisasi Realisasi Pendapatan Daerah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi yang menganugerahkan hak wewenang yang lebih besar kepada otoritas daerah agar dapat menetapkan dan memungut pajak serta retribusi. Penyesuaian tarif pajak yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini harus dilakukan secara berkala agar potensi PAD dapat teroptimalkan. Selain itu, peraturan yang mengatur sanksi harus diperkuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Iflaha Takaria, 2017). Strategi edukasi serta penyebaran informasi secara menyeluruh kepada publik mengenai urgensi pajak daerah dan konsekuensi hukum bagi yang tidak patuh harus menjadi prioritas. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, dan pelibatan tokoh masyarakat untuk menciptakan iklim perpajakan yang kondusif (Wijanarsa, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi sangat penting untuk menekan biaya pemungutan. Sistem online payment, e-filing, dan aplikasi monitoring real-time dapat mempercepat proses administrasi dan mengurangi inefisiensi (Kustiawan, 2006).

Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan dan penambahan tenaga kerja yang profesional sangat diperlukan. Perbaikan sarana dan prasarana pendukung, seperti perangkat IT dan sistem manajemen pajak, juga harus dilakukan untuk mendukung proses pemungutan yang efektif (Sitti Amalia, 2021). Melakukan pemetaan potensi PAD secara komprehensif dan berbasis data akurat agar target penerimaan dapat disusun berdasarkan potensi teoritis yang realistis. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam merancang

strategi pemungutan yang tepat sasaran dan efisien (Kustiawan, 2006). Pemerintah daerah harus lebih proaktif dan inovatif dalam pengelolaan PAD, termasuk menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan mengembangkan objek pajak baru yang potensial. Peningkatan koordinasi antar dinas terkait dan pembentukan unit khusus pengelolaan PAD dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan (Iflaha Takaria, 2017).

Dengan mengoptimalkan PAD, daerah mampu menurunkan tingkat kebergantungan terhadap dana aliran dana dari otoritas nasional, sehingga mengoptimalkan otonomi pendanaan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk menciptakan pembangunan yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Implementasi strategi ini akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang efektif dan efisien.

Peran Nilai-Nilai Religi dalam Meningkatkan Efektivitas Realisasi Pendapatan Daerah

Nilai-nilai religi memegang fungsi krusial dalam membentuk karakter dan tingkah laku masyarakat serta aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah (Asrori, 2024). Dalam konteks efektivitas realisasi pendapatan, norma-norma termasuk keterbukaan, amanah, kesetaraan, serta kewajiban moral yang diajarkan oleh berbagai agama menjadi landasan moral yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara sukarela dan penuh kesadaran (Maerani, 2012). Kesadaran ini sangat dibutuhkan mengingat rendahnya kepatuhan pajak sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran spiritual tentang pentingnya kontribusi pajak untuk kesejahteraan bersama.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, nilai-nilai religius memainkan peranan penting dalam membentuk integritas, etika kerja, serta tanggung jawab sosial para pemimpin dan aparatur pemerintah. Baik dalam Islam, Kristen, maupun Yudaisme, prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah merupakan fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan religius dapat memperkuat efektivitas dalam realisasi pendapatan daerah guna mendukung program pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan merata.

a) Al-Qur'an (Amanah, Keadilan, Transparansi, dan Kesejahteraan Sosial)

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya amanah (kepercayaan) dalam menjalankan tugas-tugas publik. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah, amanah berarti para pejabat harus mengelola keuangan daerah dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..."* (QS. An-Nisa: 58)

Nilai keadilan juga sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Setiap keputusan pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan keadilan sosial, tanpa diskriminasi atau monopoli. Pembangunan yang didukung oleh pendapatan daerah harus menjangkau masyarakat secara merata.

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)

Selain itu, Al-Qur'an menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan. Ketika pemimpin jujur dan adil dalam mengelola dana publik, maka masyarakat akan lebih percaya dan pembangunan berjalan dengan dukungan luas dari publik.

b) Injil (Integritas, Pelayanan Kepada Sesama, Tanggung Jawab, dan Kasih Sosial)

Dalam ajaran Injil, pengelolaan yang baik dimulai dari kesetiaan dalam hal-hal kecil. Ini sangat relevan dengan pengelolaan keuangan daerah, di mana integritas tidak hanya diperlukan pada proyek-proyek besar, tetapi juga dalam setiap aspek pengelolaan keuangan.

"Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar..." (Lukas 16:10)

Nilai pelayanan kepada sesama juga menjadi inti dari ajaran Injil. Realisasi pendapatan daerah bukan hanya untuk memenuhi target angka semata, tetapi harus diarahkan untuk pelayanan publik, terutama kepada yang membutuhkan.

"Karena itu, sebagaimana kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." (Lukas 6:31)

Dengan semangat pelayanan dan kasih kepada sesama, pejabat publik akan lebih terdorong untuk memastikan bahwa pendapatan daerah digunakan demi pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

c) Taurat (Ketaatan Terhadap Hukum, Keadilan, Penghindaran Korupsi, dan Perhatian Kepada Kaum Miskin)

Taurat, sebagai bagian dari Kitab Suci Yahudi, menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial dan politik. Hukum Taurat sangat keras terhadap praktik korupsi dan manipulasi keuangan.

"Janganlah engkau memutarbalikkan keadilan, janganlah engkau memihak, dan janganlah engkau menerima suap, sebab suap membutakan mata orang bijaksana dan membelokkan perkataan orang benar." (Ulangan 16:19)

Prinsip ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam realisasi pendapatan daerah harus bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti nepotisme, korupsi, atau penyalahgunaan wewenang. Taurat juga memerintahkan umat untuk memperhatikan mereka yang miskin dan tertindas, serta berbagi dari sumber daya yang dimiliki untuk mereka.

"Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan miskin di negerimu." (Ulangan 15:11)

Dengan demikian, kebijakan fiskal dan pengelolaan pendapatan daerah harus mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat bawah.

d) Zabur (Kemurnian Hati, Kejujuran, Dan Keadilan Sebagai Bagian Dari Ibadah)

Kitab Zabur, khususnya dalam Mazmur, menggambarkan pentingnya integritas dan kejujuran sebagai kualitas utama seorang pemimpin atau pelayan masyarakat.

"Ia yang hidup dengan tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dalam hatinya." (Mazmur 15:2)

Kutipan ini menegaskan bahwa efektivitas dalam pelaksanaan tugas publik, termasuk dalam realisasi pendapatan daerah, sangat ditentukan oleh integritas moral individu. Zabur juga menekankan bahwa keadilan sosial bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bentuk nyata dari ibadah dan kedekatan dengan Tuhan.

"Ia mencintai keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN." (Mazmur 33:5)

Dengan pendekatan seperti ini, pembangunan daerah yang adil dan transparan akan sejalan dengan nilai-nilai religius yang luhur dan universal.

KESIMPULAN

Dari penjelasan itu, efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting untuk menunjang proses pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat pada level regional. Namun, efektivitas ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan fiskal daerah, rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, inefisiensi pemungutan, serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Meski begitu, strategi seperti peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem perpajakan, pemetaan potensi PAD berbasis data, dan kerjasama dengan sektor swasta terbukti dapat meningkatkan efektivitas realisasi PAD, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup perbaikan regulasi, optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta penguatan sistem pemungutan berbasis teknologi. Upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM, efisiensi biaya pemungutan, serta penguatan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas yang berlandaskan prinsip-prinsip religi guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan redistribusi kewenangan fiskal secara adil untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Keempat kitab suci (Al-Qur'an, Injil, Taurat, dan Zabur), secara konsisten menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam mengelola sumber daya. Dalam konteks realisasi pendapatan daerah, nilai-nilai ini menjadi pondasi moral dan spiritual yang dapat memperkuat integritas aparatur, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberhasilan program pembangunan daerah secara berkelanjutan dan merata. Dalam konteks tersebut, nilai-nilai religi memainkan peran penting sebagai fondasi moral dan spiritual yang memperkuat efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah mendorong masyarakat untuk taat pajak serta mendorong pemerintah daerah mengelola keuangan secara transparan dan adil. Integrasi nilai-nilai religius dalam strategi optimalisasi PAD juga dapat meningkatkan kesadaran pajak melalui pendekatan spiritual dan sosial, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi material, tetapi juga bermuatan etika dan keadilan sosial.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang terpadu dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, optimalisasi potensi pajak dan retribusi melalui pemetaan berbasis data, serta peningkatan kapasitas aparatur pajak baik dari sisi teknis maupun integritas. Edukasi publik juga penting dilakukan dengan pendekatan nilai-nilai religius yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama. Pendekatan ini dapat membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

Di sisi lain, dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan dalam bentuk redistribusi kewenangan fiskal yang lebih adil guna memperluas ruang fiskal bagi daerah. Selain itu, kemitraan strategis dengan sektor swasta, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu

diperkuat dalam upaya pengawasan dan pemanfaatan PAD secara transparan. Integrasi nilai-nilai religius dari kitab suci seperti keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam pengelolaan keuangan daerah akan mendorong terciptanya pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan etika. Dengan demikian, penguatan PAD berbasis nilai religius akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alexsander Reynaldi Koli, S. Y. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Yang Diperoleh Dari Retribusi Trayek. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 133-145.
- Asrori, M. A. (2024). kuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Peran Religiusitas, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi dan Moralitas Perangkat Desa. *Jurnal Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan Vol. 20, no. 1*, 102-115.
- Azury, F., Rambe, F., Azma, R. A., Simarmata, M. C. A. B., Nasirwan, N., Basem, Z., & Marina, N. (2024). Pengukuran kinerja sektor publik di era globalisasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 6–11. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijess/index6>
- Iflaha Takaria, L. A. (2017). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.
- Kustiawan, M. (2006). Pengaruh Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mengoptimalkan Pendapatan Daerah (Survey pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 65-82.
- Lidya Even Jelista Dima, Y. D. (2025). Analisis Efisiensi, Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 235-240.
- Maerani, I. A. (2012). Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang. *Neliti*, 958-980.
- Magfiroh, A. M. (2019). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-18.
- MIKO, M. D. (2004). Identifikasi faktor-faktor penghambat upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru. *Universitas Gadjah Mada*, -.
- Nurhayati, N. Z. (2019). Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Perekonomian Daerah Pada Era Otonomi Daerah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 12-21.
- Sitti Amalia, S. B. (2021). Faktor Penghambat Pengelolaan Retribusi Sektor Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muna. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, -.
- Wahyudi Rusdi, R. A. (2021). Analisis Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dalam Menilai Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *JEKSYAH : Islamic Economics Journal*, 38-45.
- Wijanarsa, Y. (2019). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1119-1130.